



# **PROSIDING**

## **SEMINAR NASIONAL & SIDANG PLENO ISEI XVI**

**MEMPERCEPAT PENGUATAN DAYA SAING  
EKONOMI DAERAH MENGHADAPI  
MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015**

**Jambi, 18 – 20 September 2013**

Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, Sidang Pleno  
(ke-16 : 2013 : Jambi)

Prosiding Seminar Nasional dan Sidang Pleno XVI  
Mempercepat Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah  
Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015  
Editor, Hermanto Siregar...[et al.].  
Jakarta : Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (2013)  
ix & 336 hlm ; 21 X 29,7cm

ISBN 978 - 602 - 14722 - 0 - 0

Cetakan pertama, Desember 2013  
Penerbit : Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia

Jl. Daksa IV / 9, Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110  
Telp. : +62 21 720 8130 / 722 2463, Fax. : +62 21 720 1812  
Email : isei.pusat@gmail.com  
Hak Cipta PP - ISEI, 2013

# **PROSIDING**

## **SEMINAR NASIONAL & SIDANG PLENO ISEI XVI**

### **MEMPERCEPAT PENGUATAN DAYA SAING EKONOMI DAERAH MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015**

**Jambi, 18 – 20 September 2013**

#### **Editors:**

Hermanto Siregar  
Aviliani  
Edy Suandi Hamid  
Lincoln Arsyad

Mangara Tambunan  
Yoopi Abimanyu  
Nimmi Zulbainarni  
Ninasapti Triaswati

Tulus Tambunan  
Denni P. Purbasari  
Firman S. Parningotan

#### **Penyusun:**

Firman S. Parningotan  
Y. Kadarusman  
Efrilia Sukmagraha

Y. Sri Soesilo  
Rudy Badrudin  
Rokhedi P. Santoso

**Dipublikasi oleh:  
Pengurus Pusat – Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia**

## KATA PENGANTAR

**P**erwujudan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan dimulai pada akhir tahun 2015. MEA merupakan suatu momentum yang penting bagi Indonesia karena dapat memberikan peluang untuk memperluas pasar bagi produk industri dan jasa nasional. Namun di lain pihak, ada berbagai tantangan yang harus dihadapi Indonesia agar tidak sekedar menjadi tujuan pasar bagi produk dan jasa negara ASEAN lainnya. Secara konseptual, integrasi ekonomi dan sistem perdagangan bebas akan memberikan manfaat pada suatu negara jika kinerja antar sektor dan daya saing terbentuk secara khusus. Meningkatnya integrasi ekonomi antar negara ASEAN membuat profil perdagangan barang dan jasa, terutama pada sektor prioritas, antar negara ASEAN akan memiliki kemiripan. Hal ini akan mendorong adanya suatu keterkaitan antar sektor prioritas yang tinggi dan tentu saja memerlukan penguatan daya saing yang menciptakan spesialisasi industri pada setiap negara agar manfaat positif keterbukaan Masyarakat Ekonomi ASEAN dapat dirasakan setiap negara. Dengan demikian, daya saing merupakan suatu indikator penting yang menentukan suatu negara di ASEAN memperoleh kesejahteraan ekonomi dari Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Untuk memberikan kontribusi pemikiran dan langkah di tingkat pemerintahan, dunia usaha, maupun masyarakat menyangkut kesiapan Indonesia menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (PISEI) telah mengadakan Seminar Nasional dan Sidang Pleno ke-XVI, pada tanggal 18 – 20 September 2013, di Ballroom Abadi Suite Hotel – Jambi, dengan mengangkat tema: **“Mempercepat Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015”**. Tujuan penyelenggaraan Seminar Nasional & Sidang Pleno XVI adalah menganalisis dimensi-dimensi daya saing ekonomi nasional dan ekonomi daerah; mengidentifikasi sektor/produk andalan ekonomi daerah; menganalisis peluang dan tantangan yang dihadapi oleh dunia usaha; dan memberikan masukan kepada pemerintah dan pelaku ekonomi bagi perumusan kebijakan dan strategi untuk mempercepat peningkatan daya saing ekonomi. Melalui forum ini telah dirumuskan suatu rekomendasi strategi untuk mempercepat peningkatan daya saing ekonomi di tingkat daerah dan tingkat nasional sehingga Indonesia dapat lebih siap menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.

Pada saat pembukaan acara, Ketua Umum ISEI, Dr. Darmin Nasution, memberikan pidato khusus yang bertema: **“Membangun Kelembagaan Ekonomi Untuk Mendukung Daya Tahan dan Daya Saing”**. Pada akhir pidato Ketua Umum ISEI menyatakan bahwa: *“dengan merajut kelembagaan ekonomi pada berbagai bidang berarti akan membangun landasan dan mekanisme yang sehat dan kuat untuk menilai dan menyempurnakan efektifitas dan efisiensi pencapaian berbagai bidang di masyarakat”*. Seminar Nasional ini mengangkat 23 makalah yang terkait dengan tema percepatan penguatan daya saing daerah dalam menghadapi MEA 2015 pada perspektif makro maupun perspektif daerah. Semua Makalah yang dipresentasikan di dalam Seminar Nasional dan Sidang Pleno ISEI XVI dan yang masuk melalui *Call for Papers* dikumpulkan dalam Prosiding Seminar Nasional dan Sidang Pleno ISEI XVI. Di dalam prosiding ini terdapat juga Perumusan Hasil dan Rekomendasi yang disusun oleh Pengurus Pusat ISEI. Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada segenap pihak yang membantu terlaksananya seluruh rangkaian acara. Kami berharap publikasi ini dapat bermanfaat bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha di pusat dan pelaku usaha di daerah, serta masyarakat luas di seluruh Nusantara untuk mempersiapkan daya tahan dan meningkatkan daya saing menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Jakarta, September 2013

**Prof. Dr. Hermanto Siregar**  
Ketua Tim Editor

# DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar</b> .....	iv
<b>Daftar Isi</b> .....	v - vi
<b>Sambutan Tokoh Jambi</b>	
Marzuki Usman .....	vii - viii
<b>SAMBUTAN KETUA ISEI CABANG JAMBI</b>	
Prof. Dr. H. Syamsurijal Tan, S.E., M.A. ....	ix
<b>SAMBUTAN KETUA PANITIA PELAKSANA PUSAT</b>	
Prof. Dr. Edy Suandi Hamid .....	x
<b>SAMBUTAN GUBERNUR JAMBI</b>	
H. Hasan Basri Agus .....	xi - xiii
<b>ISEI MEMBANGUN KELEMBAGAAN EKONOMI UNTUK MENDUKUNG DAYA TAHAN DAN DAYA SAING</b>	
Dr. Darmin Nasution .....	1 - 6
<b>MEMPERCEPAT PENGUATAN DAYA SAING EKONOMI DAERAH MENGHADAPI ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC) 2015</b>	
Prof. Dr. Armida S. Alisjahbana .....	7 - 12
<b>DAYA SAING PERTANIAN INDONESIA MENGHADAPI ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC) 2015 DAN PASAR GLOBAL</b>	
Dr. Rusman Heriawan .....	13 - 16
<b>KESIAPAN SEKTOR JASA TERMASUK SEKTOR KEUANGAN DAN PERBANKAN INDONESIA MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) 2015</b>	
Bayu Krisnamurthi .....	17 - 24
<b>PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH DALAM MENGHADAPI ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 2015</b>	
Prasetijono Widjono Malang Joedo & Amalia Adininggar Widyasanti .....	25 - 45
<b>PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH DALAM ERA GLOBALISASI</b>	
Iskandar Simorangkir .....	46 - 65
<b>PROTEKSI PERDAGANGAN DAN PERMASALAHAN HUKUM DI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS</b>	
Dr. Agus Brotosusilo, SH., MA. ....	66 - 76
<b>PERANAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERHADAP PENGUATAN DAYA SAING EKONOMI DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR</b>	
Rudy Badrudin .....	77 - 88
<b>DAYA SAING KAWASAN EKONOMI KHUSUS: STUDI KOMPARASI INDONESIA, MALAYSIA THAILAND DAN CHINA</b>	
Sari Wahyuni .....	89 - 113
<b>PENILAIAN LINGKUNGAN DAN VALUASI EKONOMI PERIKANAN TERHADAP REKLAMASI 'WATER FRONT CITY' TELUK JAKARTA</b>	
Budy Wiryawan, Nimmi Zulfainarni & Nono Sampono .....	114 - 127
<b>PENGUATAN PRODUK UNGGULAN SEKTOR INDUSTRI DI PROVINSI JAMBI DALAM MENGHADAPI ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) 2015</b>	
Dr. Muhammad Ridwansyah & Dr. Tona Aurora Lubis .....	128 - 137
<b>MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015: PELUANG, TANTANGAN DAN ANCAMAN BAGI UMKM INDONESIA</b>	
Tulus Tambunan .....	138 - 159

<b>SISTEM MANAJEMEN PENGEMBANGAN EKONOMI NELAYAN DI KABUPATEN PESISIR SELATAN 1</b>	
Firwan Tan .....	160 - 175
<b>KESIAPAN INTEGRASI EKONOMI ASEAN DAN PELAJARAN DARI KRISIS EROPA</b>	
Gaffari Ramadhan .....	176 - 196
<b>PENGEMBANGAN DAN DAYA SAING INDUSTRI ROTAN DAN BATIK DALAM MENGHADAPI TANTANGAN MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) 2015 (STUDI KASUS PADA INDUSTRI ROTAN DAN BATIK DI KABUPATEN CIREBON-JABAR)</b>	
Dr. Hj.lda Rosnidah, SE. MM., Ak., Moh. Yudi Mahadianto, SE., MM. & Adi Setiawan, SE., MM. ....	197 - 211
<b>PERTUMBUHAN INDUSTRI KREATIF DI SURABAYA MELALUI UPAYA TRIPLE HELIX DAN KEUNGGULAN BERSAING</b>	
Gendut Sukarno .....	212 - 224
<b>PEMETAAN DAN PEMERINGKATAN ACARA BUDAYA KAJIAN DAYA SAING PRODUK PARIWISATA DIY</b>	
Amiluhur Soeroso, Ike Janita Dewi, Murti Lestari & Y. Sri Susilo .....	225 - 241
<b>PERANAN KOMODITI KELAPA SAWIT DALAM PEREKONOMIANDAERAH PROVINSI JAMBI: ANALISIS INPUT-OUTPUT TAHUN 2000, TAHUN 2010 DAN PERBANDINGANNYA</b>	
Edwin Mahatir M. R. & Bambang Juanda.....	242 - 253
<b>PENGELOLAAN SUMBERDAYA, STRATEGI BISNIS, ANALISIS LINGKUNGAN DAN EVALUASI KEUNGGULAN KOMPETITIF PERUSAHAAN MANUFAKTUR JAWA TIMUR: PENDEKATAN STUDI KASUS</b>	
Lena Ellitan .....	254 - 278
<b>EKSPOR DAN PEREKONOMIAN DAERAH: ANALISIS EMPIRIS HIPOTESIS EXPORT-LED GROWTH DAN GROWTH-DRIVEN EXPORT</b>	
Heni Hasanah & Hermanto Siregar .....	279 - 289
<b>PERKEMBANGAN DAYA SAING PRODUK EKSPOR INDONESIA DALAM LINGKUP REGIONAL ASEAN DAN CHINA SELAMA PERIODE 2000-2010</b>	
Dr. Sulthon Sjahril Sabaruddin .....	290 - 301
<b>RE-INDUSTRIALISASI INDONESIA, KONSOLIDASI OTONOMI DAERAH, MASYARAKAT EKONOMI ASEAN</b>	
Djisman Simanjuntak .....	302 - 305
<b>TANTANGAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS</b>	
Agus Dwitarto .....	306 - 317
<b>KEBIJAKAN USAHA DI DAERAH (KABUPATEN/KOTA): GAMBARAN REGULASI PUNGUTAN DAN PERIJINAN DI ERA OTONOMI</b>	
Robert Endi Jaweng .....	318 - 327
<b>PERUMUSAN HASIL: SEMINAR NASIONAL &amp; SIDANG PLENO ISEI XVI "MEMPERCEPAT PENGUATAN DAYA SAING EKONOMI DAERAH MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015" JAMBI, 18-20 SEPTEMBER 2013</b>	
PP ISEI .....	328 - 329

\*\*\*

## SAMBUTAN TOKOH JAMBI

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

**P**erkenankanlah saya sebagai Tokoh Indonesia kelahiran Jambi menyampaikan rasa syukur kehadirat Allah Yang Maha Esa, bahwa akhirnya Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) memutuskan untuk bersidang Pleno ISEI yang ke XVI di kota Jambi. Meskipun saya pernah menjadi Ketua Umum ISEI selama 7 tahun, yaitu dari tahun 1993 – 2000, tetapi saya tidak berhasil meyakinkan ISEI untuk bersidang pleno di kota Jambi.

Rekan-rekan pimpinan ISEI pada waktu itu mereka bertanya, apakah kota Jambi memiliki fasilitas yang cukup untuk menyelenggarakan Sidang Pleno ISEI? Sayapun tidak lagi memaksa, agar ISEI mau bersidang Pleno di kota Jambi, karena teman saya sendiri, Mar'ie Muhammad, ketika ditahun 1995, beliau menjadi Menteri Keuangan Republik Indonesia, bertanya kepada saya, "Marzuki, kota Jambi itu dibandingkan dengan Ciputat, Jakarta, besar mana?" Tetapi, alhamdulillah berkat kerja keras dan cerdas dari Gubernur Jambi, Bapak Hasan Basri Agus, dimana-manakan sudah pada bermunculan hotel-hotel baru berkelas internasional. Maka oleh karena itu, saya minta kepada ISEI, agar nanti pada Kongres ISEI yang akan datang, supaya ditetapkan di Jambi!

Alhamdulillah, keputusan ISEI untuk bersidang Pleno yang ke XVI di kota Jambi dengan tema, "Mempercepat Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015", adalah tepat sekali. Kenapa demikian?

Hadirin sekalian yang berbahagia,

Ijinkanlah saya mengemukakan alasan kenapa kota Jambi, tepat sekali sebagai tempat untuk mencanangkan langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh Indonesia, agar Indonesia bisa mengisi ASEAN, dan bukan ASEAN yang mengisi Indonesia.

Pertama, diabad ke 7, yakni pada tahun 600-an, di Jambi telah berdiri suatu Kerajaan Melayu Tua, Ibu Wiendu Nuryanti, Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Bidang Kebudayaan, Republik Indonesia, menduga kerajaan itu sebagai *The Lost Kingdom of Sumatera*. Buktinya adalah berupa peninggalan Candi Muaro Jambi, yang luasnya 2600 hektar. Saya persilahkan para peserta Sidang Pleno ISEI untuk berkunjung ke situs Candi Muaro Jambi, yang tidak begitu jauh dari kota Jambi. Direktur Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Prof. Dr. Kacung Marijan, sudah menyatakan bahwa Candi Muaro Jambi diusahakan untuk menjadi Warisan Dunia, *The World Heritage*. Dalam waktu dekat di Jambi akan diadakan Seminar Internasional, Candi Muaro Jambi dan Candi Nalendra di India.

Kedua, kenapa candi-candi ini didirikan di Muaro Jambi pada abad ke 7 itu? Jawabnya, pada waktu itu China sudah besar dan berjaya, demikian juga dengan India. Didalam hubungan dagang, kedua negara pada waktu itu, para saudagar China mau ke India, dan saudagar India mau ke China, karena jalan darat yang memerlukan waktu yang lama, maka mereka mengambil jalan laut. Karena letak Muaro Jambi (baca: Indonesia) secara geografis berada diposisi yang strategis, maka kapal laut China, ketika Matahari berada dibelahan bumi bagian selatan, angin berembus dari utara ke selatan, maka mereka berlayar dari China dan berhenti di Muaro Jambi. Demikian pula kapal-kapal India, berlayar ke China, tetapi berhenti dulu di Muaro Jambi. Ketika angin berganti arah, maka kapal-kapal China terus ke India, dan kapal-kapal India terus ke China.

Ketiga, Muaro Jambi (Indonesia) memiliki *absolut advantage*, disamping lokasi yang strategis juga menghasilkan emas, disebut sebagai pulau emas (Swarna Dwipa), cula badak untuk obat, rempah-rempah lada dan pala, gading gajah, pinang, yang pada waktu itu merupakan barang-barang yang mahal.

Hadirin sekalian yang berbahagia,

Sekarang China dan India kembali besar lagi. China pada tahun 2013 ini memiliki Cadangan Devisa

sebanyak USD 3500 miliar, dan India memiliki Cadangan Devisa sebanyak USD 500 miliar. Banyak ekonom dunia yang membaca, China adalah masa mendatang, Amerika masa lalu, dan Eropa barang antik. Hal ini dapat dibaca, bahwa saatnya Indonesia untuk menjadi besar kembali. Cuma, kata pepatah Jawa, *Ono mangsane* (Waktunya), *Ono wonge* : Pertanyaannya, siapakah orang itu yang nanti akan menyamakan kedudukan ekonomi Indonesia dengan China dan India?

Saya berpendapat bahwa, Indonesia supaya kembali lagi kepada strategi perdagangan luar negeri yang memanfaatkan kebolehan absolut (*absolut advantage*). Faktanya, 1500 juta penduduk China senang sekali memakan: Durian, Alpokat dan Mangga Indonesia. Mereka juga suka sekali menyantap: daging buaya, daging ular pithon, daging labi-labi, daging biawak, dan sebagainya. Kalaulah Indonesia, baca daerah-daerah di Indonesia, memusatkan usahanya kepada peringkatan ekspor barang-barang yang sangat disukai oleh 1500 juta penduduk China, maka ketika nanti memasuki era mondial, era dimana mulai Perdagangan Bebas (*Free Trade*), Indonesia akan bisa menjadi anggota dari Tiga Negara Penggerak Ekonomi Dunia (*The Three Globe Economic Generator*), yaitu : China, India dan Indonesia.

Hadirin sekalian yang berbahagia,

Saya atas nama masyarakat Jambi mengucapkan banyak terima kasih kepada ISEI dan anggotanya yang telah berkenan bersidang Pleno ke XVI di kota Jambi. Selagi berada di Jambi, saya sarankan jangan lupa menikmati wisata kuliner, seperti: gulai tempoyak, mie celor, kue padamaran, dan juga mengunjungi Candi Muaro Jambi, kebun binatang Jambi, yang banyak harimaunya. Jangan lupa pula membeli batik Jambi, kain songket Jambi. Nanti ketika balik ketempat masing-masing, jangan lupa membeli oleh-oleh berupa: empek-empek, kopi Jambi, dan durian Jambi. Terima kasih,

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Jambi, 18 September 2013

**Marzuki Usman**



## SAMBUTAN KETUA ISEI CABANG JAMBI

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Puji syukur kepada Allah SWT, akhirnya Sidang Pleno Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) dapat dipercayakan dan diselenggarakan di Jambi. Tentu ini suatu kehormatan bagi masyarakat Jambi, karena Jambi dipandang memenuhi kriteria sebagai tuan rumah perhelatan nasional tersebut. Salah satu kriterianya adalah tersedianya sarana dan prasarana seperti hotel dan jasa penerbangan serta tempat rekreasi dan infrastruktur lainnya. (*sebelumnya pada setiap perdebatan tentang tuan rumah, sering Jambi dipandang sebelah mata*). Hal lain yang tidak kalah pentingnya yang menjadi pertimbangan adalah keberhasilan pembangunan dan dukungan dari pemerintah daerah untuk pelaksanaan sidang pleno tersebut.

Khusus bagi Ikatan Sarjana Ekonomi (ISEI) Cabang Jambi merupakan ujian dan kepercayaan pertama diberikan oleh ISEI pusat, yang sangat terkait erat dengan perkembangan dan kontribusi ISEI Jambi pada setiap pelaksanaan kegiatan ISEI dan perjuangan meyakinkan ISEI pusat pada Kongres tahun 2012 di Yogyakarta. Kemudian juga keberanian, kekompakan dan daya juang pengurus ISEI Jambi periode 2012-2016 untuk melaksanakan programnya dalam memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan khususnya pembangunan Provinsi Jambi. Untuk itu sidang Pleno ISEI digabungkan dengan seminar nasional dengan tema: "*Mempercepat Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015*". Kami sangat yakin bahwa makalah dan *presenter* yang terpilih dengan sangat ketat, serta kualitas peserta seminar, akan mampu menjawab dan membahas tuntas tema utama tersebut.

Salah satu persoalan ekonomi Indonesia sekarang adalah lemahnya daya saing ekonomi daerah termasuk ekonomi Jambi. Satu sisi banyak daerah yang mempunyai keuntungan komparatif (*comparative advantage*) bila dilihat dari sumber daya alam dan sumber daya manusia, tetapi lemah dalam daya saing (*competitive advantage*) pada pasar baik nasional maupun internasional, sehingga berimbas kepada melemahnya keuntungan neraca perdagangan (*balance of trade*) dan membesarnya defisit neraca transaksi berjalan (*current account*). Tidak mengherankan kondisi ini merupakan salah satu faktor kepada melemahnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing terutama dengan Dollar Amerika Serikat, yang sekarang menjadi isu hangat persoalan ekonomi Indonesia. Melalui Seminar Nasional ini diharapkan dapat memberi kontribusi dan masukan kepada kebijakan pemerintah untuk meningkatkan daya saing ekonomi daerah. Sebagai tuan rumah, kami berharap akan keluar rekomendasi kepada pemerintah pusat untuk membantu mempercepat daya saing ekonomi Jambi salah satunya adalah mendorong dan membantu cepat selesainya pembangunan pelabuhan laut dan pelabuhan udara internasional.

Sebagai ketua ISEI Jambi, saya meyakinkan kesuksesan pelaksanaan Seminar Nasional dan Sidang Pleno ISEI XVI di Jambi merupakan kerjasama semua pihak. Untuk itu sepantasnya kami mengucapkan terima kasih kepada: *Pertama*, Pengurus Pusat ISEI atas kepercayaannya. *Kedua*, pemerintah daerah dalam pendanaan dan penyelenggaraan, khususnya perhatian dan dukungan nyata Bapak Gubernur H. Hasan Basri Agus yang ikut mengarahkan suksesnya acara tersebut. *Ketiga*, pemerintah Kota Jambi terutama sebagai tempat dan sponsor dana pada acara hari kedua. *Keempat*, semua pihak yang telah memberi kontribusi baik materi maupun sumbangan pemikiran antara lain Bank Indonesia dan pengelola Candi Muara Jambi yang telah memberi sumbangan dana. Akhirnya, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua panitia dengan tanpa gaji dan upah telah bekerja sama untuk suksesnya acara ini. Kepada anak-anak kami mahasiswa Fakultas Ekonomi yang terlibat, kalian telah mewarnai kesuksesan perhelatan nasional di Jambi. Sukses beserta kita semua.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Jambi, 18 September 2013

**Prof. Dr. H. Syamsurijal Tan, S.E., M.A.**

# SAMBUTAN KETUA PANITIA PELAKSANA PUSAT

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

**P**uji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan anugerahNya kita dapat bertemu dan berkumpul di Kota Jambi untuk menyelenggarakan Seminar Nasional dan Sidang Pleno XVI ISEI pada tanggal 18 – 20 September 2013.

Tema Seminar Nasional dan Sidang Pleno ISEI XVI adalah: “Mempercepat Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015”. Tema utama ini ditentukan mengingat pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN tidak akan lama lagi, dan banyak pihak menilai bahwa Indonesia belum siap menghadapi regionalisme di tingkat ASEAN ini karena daya saing ekonomi nasional dan ekonomi daerah yang dinilai masih belum kuat. Potensi dan prospek perekonomian Indonesia yang berkelimpahan sumber daya produksi tidak akan berkelanjutan jika tidak diikuti dengan daya saing ekonomi daerah. Kenyataannya saat ini meskipun suatu daerah kaya dengan sumber daya alam, tetapi daerah tersebut tidak memiliki industri pengolahan bahan mentah tersebut. Demikian pula daerah yang memiliki potensi pariwisata tetapi tidak siap dengan industri jasa pendukungnya.

Setiap daerah sejak lama hanya menikmati nilai tambah output yang rendah dan cenderung kalah bersaing dengan negara ASEAN lain yang memiliki strategi industri pengolahan dan jasa yang semakin maju. Untuk itu harus disadari bahwa daya saing ekonomi daerah harus ditingkatkan dan Masyarakat Ekonomi ASEAN yang sebentar lagi diberlakukan harus dijadikan momentum untuk menuju perekonomian yang berbasis pada efisiensi tenaga kerja dan efisiensi pasar. Untuk mendapatkan kondisi yang terkini tentang ekonomi di daerah maka panitia pengarah menetapkan beberapa ISEI Cabang untuk melakukan riset kecil terutama pada daerah-daerah yang memiliki keunggulan komoditas agroindustri, tekstil, pelayanan logistik, dan pariwisata selain informasi terkini ekonomi daerah juga dilakukan oleh para dosen, peneliti dari beberapa perguruan tinggi dan lembaga lain yang mengikuti *call for papers* dalam rangka Seminar Nasional dan Sidang Pleno ISEI XVI.

Ada dua kegiatan utama yang akan diselenggarakan oleh kita bersama. *Pertama*, Seminar Nasional yang terdiri dari dua *plenary session* dan dua *parallel session*. *Plenary session* yang pertama memberikan perhatian pada tinjauan makro. Kemudian *plenary session* kedua pada perspektif daerah atas upaya percepatan penguatan daya saing ekonomi daerah menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. Pada *Parallel session* akan diisi oleh para pemenang *call for papers* yang berasal dari berbagai perguruan tinggi dan anggota cabang ISEI. *Kedua*, Sidang Pleno yang akan diikuti oleh sebagian besar Pengurus Pusat ISEI dan 40 Ketua ISEI Cabang dari 51 ISEI Cabang di seluruh Indonesia, tercatat jumlah peserta yang diperkirakan akan hadir sejumlah 600 peserta.

Akhirnya, kami atas nama segenap Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana Pusat Seminar Nasional dan Sidang Pleno XVI mengucapkan terimakasih atas dukungan segenap pihak mulai dari pihak sponsor, pihak panitia daerah, pihak pemerintah pusat dan khususnya kepada pihak pemerintah kota dan pihak pemerintah daerah Jambi yang telah mendukung sejak awal persiapan sampai dengan pelaksanaan acara. Kiranya segala tujuan kegiatan Seminar Nasional dan Sidang Pleno ISEI XVI dapat tercapai dengan baik berkat perhatian dan koordinasi segenap pihak.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Jambi, 18 September 2013

**Prof. Dr. Edy Suandi Hamid**  
*Ketua Panitia Pelaksana Pusat*

## SAMBUTAN GUBERNUR JAMBI

*Assalaamu'alaikum Wr. Wb.*

**P**ertama-tama sebagai Gubernur Jambi, saya ingin mengucapkan selamat atas pelaksanaan Seminar Nasional dan Sidang Pleno XVI Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia yang diselenggarakan di Jambi, tanggal 18-20 September 2013. Saya juga mengucapkan selamat datang kepada peserta yang datang dari berbagai wilayah di Indonesia dan berpartisipasi dalam membahas upaya-upaya untuk mempersiapkan Indonesia menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tahun 2015.

Pada kesempatan ini, saya atas nama Pemerintah Provinsi Jambi dan masyarakat, juga mengucapkan terima kasih atas dipilih dan dipercayakannya Provinsi Jambi sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan ini. Ucapan terima kasih juga tidak lupa saya sampaikan kepada semua pihak yang telah berupaya sejak jauh-jauh hari mempersiapkan dan menyukseskan kegiatan ini. Saya yakin tanpa kerja keras dan koordinasi yang rapi antara Panitia Pusat dan Daerah, tidak mungkin rangkaian kegiatan Seminar Nasional dan Sidang Pleno ini, dapat diselenggarakan dengan baik.

Bapak Menteri dan peserta yang saya hormati,

Sejak awal saya diinformasikan bahwa Seminar Nasional dan Sidang Pleno XVI, ISEI mengangkat tema "MEMPERCEPAT PENGUATAN DAYA SAING EKONOMI DAERAH MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015", saya sangat antusias mengikutinya karena sangat relevan dengan kondisi aktual yang dihadapi oleh daerah. Masih banyak pihak yang berpandangan bahwa keadaan perdagangan Indonesia setelah implementasi MEA sesungguhnya masih sulit diprediksi. Dikhawatirkan bagi pelaku ekonomi yang tidak mampu bersaing, akan sulit mempertahankan kelangsungan usahanya sehingga akan menimbulkan banyak pengangguran. Pada sisi yang lain, sejumlah pelaku ekonomi justru menyambut baik perjanjian MEA ini. Mereka optimis MEA dapat memberikan keuntungan karena membuka peluang terutama bagi industri hilir pertanian lebih berkembang. Dengan keberadaan bahan baku dan tenaga kerja yang melimpah di Indonesia, MEA lebih menjanjikan keuntungan karena masa depan ekspor Indonesia akan meningkat karena membuka pasar yang lebih besar.

Mencermati tema Seminar Nasional dan Sidang Pleno ini, perkenankan saya mengupas sedikit tentang perekonomian Jambi dalam kaitannya dengan implementasi MEA 2015 serta perdagangan bebas pada umumnya. Posisi geografis Jambi memiliki keuntungan alamiah (*natural advantage*) karena menghadap langsung ke Laut China Selatan serta memiliki akses ke Selat Malaka yang merupakan jalur pelayaran perdagangan paling sibuk di dunia. Posisi ini sangat memungkinkan bagi Jambi untuk melakukan perdagangan internasional intra ASEAN dengan biaya transportasi yang lebih rendah sehingga dapat menarik keuntungan yang berlipat ganda. Peluang besar juga diperoleh Jambi sejalan dengan kebangkitan ekonomi China menjadi raksasa ekonomi di kawasan Asia Pasific serta dalam konteks perdagangan antar regional dengan diberlakukannya China-ASEAN Free Trade Area (CAFTA), tahun 2020. Atas dasar pemikiran inilah Pemerintah Provinsi Jambi bertekad dan bekerja keras untuk membangun Pelabuhan Samudera Ujung Jabung. Alhamdulillah, berkat dukungan dari pemerintah pusat khususnya dari Kementerian Koordinator Perekonomian, Bappenas serta Perhubungan, rencana pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung sudah masuk dalam revisi Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Jajaran Pemerintah Provinsi Jambi akan terus berjuang agar infrastruktur yang sangat dibutuhkan ini mulai dibangun dalam waktu yang tidak berapa lama lagi, termasuk dengan menjajajaki kerjasama dengan pihak swasta dalam negeri maupun luar negeri.

Penduduk Provinsi Jambi dewasa ini berjumlah 3,1 juta jiwa dengan kepadatan rata-rata hanya 57,8 jiwa per kilometer. Penduduk Jambi telah terbiasa dengan interaksi multi etnis di bidang sosial, budaya dan ekonomi sehingga Provinsi Jambi termasuk salah satu daerah yang teraman di Indonesia. Sementara kearifan lokal terus ditumbuh-kembangkan dalam kehidupan sosial dan budaya melalui lembaga adat hingga sampai ke desa-desa. Ini semua merupakan kondisi pemungkin yang besar dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan termasuk dalam kegiatan investasi dan perdagangan dalam menghadapi MEA pada tahun 2015.

Provinsi Jambi juga memiliki Situs Percandian Muaro Jambi yang merupakan tinggalan arkeologi terluas di Indonesia dengan luas 2.062,5 hektar, dibangun pada masa klasik abad 7 – 15 M (Melayu Kuno). Potensi Arkeologi tergambar dari konsep kosmologi dan ekologi yang diwujudkan dengan bangunan-bangunan candi, pemukiman, kolam dan sistem jaringan kanal yang diselaraskan dengan kondisi alamnya. Dinamika pembangunan kompleks percandian ini terus maju. Sejak tahun 2009 kompleks candi ini telah didaftarkan ke UNESCO untuk ditetapkan sebagai peninggalan sejarah warisan dunia. Kemudian, pada tanggal 22 September 2011 yang lalu, kawasan ini juga telah diresmikan oleh Presiden Bambang Soesilo Yudoyono sebagai “Kawasan Wisata Sejarah Terpadu”. Dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat, kami terus mengembangkan kompleks percandian Muaro Jambi sebagai objek yang dapat memberikan manfaat pada implementasi MEA 2015. Potensi Candi Muarajambi harus digali dan dikembangkan guna dimanfaatkan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, kebudayaan, pariwisata, perekonomian, dan pembangunan daerah secara umum.

Bapak Menteri dan hadirin yang saya hormati,

Hingga dewasa ini, perekonomian Provinsi Jambi masih mengandalkan kelimpahan sumber daya alam yang dimilikinya terutama sektor pertanian. Pada tahun 2012, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jambi untuk sektor pertanian memberikan kontribusi sekitar 29%. Sektor pertanian juga penting perannya dalam menyusun struktur lapangan kerja di Provinsi Jambi di mana hingga tahun 2012 mencapai 52%.

Jambi memproduksi komoditas ekspor yang dapat menjadi andalan dalam perdagangan internasional. Di antaranya adalah karet alam dengan produksi 265.875 ton per tahun; kelapa sawit dengan produksi Tandan Buah Segar (TBS) 6,3 juta tonyang menghasilkan produksi Cruide Palm Oil (CPO) 1,3 juta ton per tahun; kayu manis 57.450 ton per tahun; kelapa dalam dengan produksi 113.089 ton per tahun; dan kopi 12.731 ton per tahun. Di dalam perut bumi Jambi juga terdapat cadangan minyak bumi sebesar 395.445,68 barel; gas bumi 15.672,87 BSCF; panas bumi 549 MW; dan batu bara 383,20 juta ton.

Berdasarkan Indeks Konsentrasi Pasar, produk CPO dan Karet serta Produk Ikan olahan juga memiliki nilai yang cukup signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun produk tersebut cukup potensial, namun perlu peningkatan jumlah pasar sasaran, sehingga tidak lagi tertuju hanya pada satu atau dua pasar. Jika tujuan ekspor komoditi tersebar ke banyak negara, komoditi tersebut relatif tahan terhadap gangguan (*disturbance*) yang terjadi dalam perdagangan internasional. Eksportir komoditas unggulan Provinsi Jambi perlu melakukan strategi pengembangan pasar secara terus menerus guna menjaga stabilitas nilai ekspor.

Berdasarkan Indeks *Reveal Competitive Advantage* (RCA), Provinsi Jambi memiliki keunggulan komparatif untuk komoditi karet alam olahan dan karet remah. Oleh karena itu, strategi revitalisasi karet rakyat masih menjadi prioritas pembangunan pertanian di Provinsi Jambi agar keunggulan komparatif tersebut masih dapat dipertahankan. Sementara komoditi CPO meskipun cukup potensial, namun sedikit berfluktuasi diakibatkan infrastruktur yang belum memadai serta pengaruh krisis global terhadap permintaan dari CPO tersebut. Untuk itu, kebijakan infrastruktur terutama pembangunan jalan dan jembatan serta pembangunan kawasan Ekonomi Ujung Jabung terus diupayakan.

Bapak Menteri dan Hadirin yang saya hormati,

Selain potensi yang dimiliki oleh Provinsi Jambi, kami juga menyadari beberapa persoalan yang memerlukan solusi, antara lain adalah: (1) Perekonomian Provinsi Jambi memerlukan percepatan transformasi sehingga lebih seimbang; Penduduk Jambi yang bekerja pada sektor pertanian ditandai dengan tingkat pendidikan umumnya masih rendah, inisiatif dan kreativitas tergolong rendah, kurang responsif terhadap adopsi teknologi sehingga produktivitas usahatani mereka masih rendah; (2) Dalam upaya untuk mendapatkan keuntungan (*gain*) yang lebih besar dalam kegiatan perdagangan dan industri, Provinsi Jambi terkendala oleh kesediaan energi listrik untuk mendukung pembangunan industri pengolahan serta pelabuhan samudra untuk menjangkau pasar yang lebih luas; (3) isu kunci lainnya adalah permasalahan pembiayaan terhadap infrastruktur ekonomi dan publik ditengah kemampuan Anggaran Pemerintah yang terbatas.

Bapak Menteri dan Hadirin yang saya hormati,

Kendatipun pro dan kontra terus bergulir tentang kesiapan Indonesia menuju MEA 2015, menurut hemat saya era globalisasi adalah suatu keniscayaan. Keikutsertaan Indonesia dalam perjanjian perdagangan bebas tidak dapat dicegah ataupun dibatalkan. Lazimnya di dalam kesepakatan perjanjian perdagangan bebas, kendati terdapat klausul-klausul yang memberi kesempatan para pihak menyesuaikan diri dalam rangka memperbaiki posisi daya saingnya, namun Indonesia harus terus berbenah dan bekerja keras dalam melaksanakan komitmen perjanjian MEA sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Sebagaimana daerah-daerah lainnya di Indonesia, Provinsi Jambi berupaya untuk menjadi *the new frontier economic* atau daerah baru bagi perkembangan ekonomi ke depan, Provinsi Jambi akan memelopori daya saing bangsa di tengah ekonomi Asia dan menjadi penggerak ekonomi utama abad ke-21 ini.

Saya berharap rangkaian Kegiatan Seminar dan Sidang Pleno Nasional ISEI XVI Tahun 2013 di Provinsi Jambi ini, berjalan dengan baik dan lancar serta dapat memberikan rekomendasi dalam upaya MEMPERCEPAT PENGUATAN DAYA SAING EKONOMI DAERAH MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015". Untuk itu, melalui pengalaman, pengetahuan dan wawasan anggota ISEI yang telah dikenal luas oleh publik, secara khusus saya meminta seminar nasional dan sidang pleno ISEI yang akan digelar mencermati empat hal. *Pertama*, menyiapkan peta jalan yang terpadu bagi upaya percepatan transformasi ekonomi daerah yang berkelanjutan. *Kedua*, menyusun *prototype* kawasan industri yang adaptif, dan mengupayakan suatu rekomendasi suatu *pilot project* di daerah tertentu. *Ketiga*, mencari solusi perubahan struktural bagi pembiayaan terhadap pembangunan infrastruktur ekonomi dan publik termasuk dengan menempatkannya dalam revisi Undang-Undang Keuangan Negara yang tengah berlangsung sekarang ini. *Keempat*, menyusun kerangka konseptual bagi pengembangan *entrepreneurship Government*, untuk mendorong perdagangan, investasi, manajemen logistik serta penyediaan SDM yang kompetitif.

Akhirnya saya mengucapkan selamat mengikuti rangkaian kegiatan Seminar Nasional dan Sidang Pleno Nasional ISEI XVI Tahun 2013, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan taufik dan hidayah-Nya serta memberikan kekuatan lahir dan batin kepada bangsa Indonesia.

*Wabillahi taufik Walhidayah  
Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Jambi, 18 September 2013

**H. Hasan Basri Agus**  
*Gubernur Jambi*

# MEMBANGUN KELEMBAGAAN EKONOMI UNTUK MENDUKUNG DAYA TAHAN DAN DAYA SAING\*)

Dr. Darmin Nasution

## Dinamika Internal di Tengah Gejolak Ekonomi Global

Krisis ekonomi global yang bermula dari krisis KPR bodong (*subprime mortgage*) di Amerika Serikat pada paruh kedua 2007 menular kepada sistem keuangan dunia pada tahun berikutnya. Negara ini yang kehabisan ruang memacu kebijakan fiskal, seperti yang dialami negara maju pada umumnya, menempuh kebijakan moneter yang tidak lazim guna keluar dari tekanan krisis. Kebijakan ini yang kemudian dikenal dengan “*quantitative easing*” (QE) merupakan upaya Bank Sentral mengguyur likuiditas ke dalam perekonomian dengan cara membeli berbagai aset. Harap dicatat bahwa pembelian tidak hanya terhadap surat berharga pemerintah, melainkan juga yang diterbitkan swasta dan bahkan yang masuk kategori aset “*toxic*” sekalipun. Kebijakan tersebut memang menunjukkan hasil yang positif sehingga krisis kemudian beralih ke zona ekonomi Eropa. Memperoleh hasil yang menggembirakan dari upaya tersebut mendorong Amerika Serikat melanjutkan kebijakan QE kedua dan selanjutnya ketiga sampai sekarang ini, walaupun hasilnya terbukti semakin kecil.

Guyuran likuiditas tersebut pada gilirannya menggiring arus penempatan dana ke kawasan yang memberi *return* lebih tinggi dengan risiko rendah atau moderat. Indonesia termasuk negara *emerging* yang menjadi tujuan penempatan dana panas tersebut. Di latar belakang fenomena ini sesungguhnya semua pihak sepakat bahwa manakala kebijakan tersebut dikurangi atau bahkan dihentikan, yang ditandai dengan *recovery* ekonomi AS, maka segera akan terjadi pembalikan arah dana kembali ke negeri asalnya.

Di Indonesia fenomena masuknya dana murah dalam jumlah besar tersebut, berakumulasi dengan mulai pulihnya perekonomian dari krisis besar Asia, yang ditopang oleh konsumsi domestik, ekspor, dan kemudian investasi. Maka kita menyaksikan fenomena yang menarik dimana tingkat bunga tertekan ke bawah, dan tercipta pertumbuhan kredit melebihi kenaikan dana pihak ketiga dalam beberapa tahun terakhir. Di pihak lain aliran dana murah membuka peluang pemerintah dan juga swasta melakukan pinjaman dengan biaya rendah. Pemerintah meminjam melalui penerbitan obligasi sedangkan swasta meminjam ke lembaga keuangan dalam negeri maupun internasional. Keduanya mendorong pinjaman dengan kecepatan yang semakin tinggi.

Dinamika yang dilalui ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, sebagaimana negara *emerging* pada umumnya, merupakan kombinasi yang nyaris sempurna dari peluang emas sekaligus ancaman bahaya. Peluang emas datang dalam bentuk aliran dana murah dalam jumlah besar, untuk ukuran negara *emerging* manapun. Sementara bahaya berupa pelarian modal dalam jumlah besar menghadang pada moment dan rentang waktu yang ditentukan pihak lain.

Menghadapi situasi yang demikian Inisiatif kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia terdiri dari empat unsur. *Pertama*, membentengi instrumen moneter terhadap spekulasi aliran dana asing. Dalam hal ini BI menetapkan batas waktu minimum pemilikan Sertifikat Bank Indonesia. *Kedua*, menekan tingkat bunga – melalui penetapan suku-bunga kebijakan- serendah mungkin, sehingga gelombang masuknya modal asing jangka pendek tidak terlalu besar. Kebijakan ini juga bertujuan untuk mendorong pertumbuhan sektor riil. *Ketiga*, memupuk cadangan devisa untuk berjaga-jaga apabila terjadi pembalikan arus modal tiba-tiba. *Keempat*, dalam hal terjadi gejolak yang diiringi oleh aliran dana keluar, BI melakukan aksi pembelian SBN segera setelah dilakukan intervensi di pasar valas.

Kebijakan ini selain melahirkan “*self assurance*” menghadapi goncangan, berfungsi pula mengurangi kejatuhan harga SBN dan saham serta mengurangi kepanikan jual. BI memiliki instrumen mengatur kembali

---

\* Pidato Ketua Umum ISEI

likuiditas melalui pembelian SBN setelah menyedot rupiah pada saat intervensi di pasar valas. Selain itu kebijakan ini bermanfaat pula memperkuat neraca BI. Rangkaian kebijakan ini mampu mengisolasi eksposur neraca keuangan BI dari gejolak pasar keuangan.

Selanjutnya untuk mengantisipasi deficit transaksi berjalan –yang diperkirakan segera terjadi– BI memberlakukan pengaturan tentang DHE (devisa hasil ekspor). Suatu langkah terobosan dibawah kendala Undang-undang yang sangat bebas.

Sayangnya Pemerintah kurang mengambil dapat untuk mengoptimalkan manfaat atau mengantisipasi dinamika aliran dana tersebut. Tidak lahir misalnya keragaman instrument investasi, teristimewa dalam rangka pembiayaan infrastruktur. Kebijakan ini sekaligus berfungsi menahan arus balik pada saat diperlukan, karena instrument ini selain bersifat jangka panjang juga menjanjikan *capital gain* yang menarik.

### **Defisit Transaksi Berjalan: Kelemahan Fundamental Ekonomi?**

Masih segar dalam ingatan kita beberapa tahun berlalu ketika ekonomi Indonesia dianggap memiliki daya tahan atau resiliensi terhadap gejolak yang terjadi di berbagai belahan dunia. Pandangan yang demikian disampaikan pula oleh pers internasional terpendang, seperti *The Economist* dan *Financial Times*. Itulah periode ketika pertumbuhan ekonomi Indonesia ditopang oleh tiga faktor penting sekaligus, yaitu ekspor, konsumsi dalam negeri dan investasi. Prestasi yang demikian baik memang tidak berlangsung lama, yaitu dari tahun 2009 sampai 2011. Dalam periode itu tujuan utama ekspor Indonesia juga berubah dari Jepang dan USA ke Cina, India, dan negara *emerging*. *Capital inflow* mengalir dengan deras sehingga tingkat bunga bergerak turun, dana murah tersedia bagi pemerintah, perbankan maupun pasar modal. Sedangkan investasi meningkat pesat, walaupun lebih berorientasi kepada konsumsi dalam negeri, termasuk properti dan sarana transportasi.

Secara kasat mata kelemahan ekonomi Indonesia berada pada ketidakseimbangan eksternal. Tanpa faktor perubahan kebijakan QE pun yang makin sering dibicarakan akhir-akhir ini konstalasi neraca pembayaran (NP) telah secara terus menerus menekan perekonomian Indonesia sejak September 2011. Sesungguhnya kelemahan tersebut juga telah ada sejak tiga dasawarsa yang lalu, dan merupakan warisan kelemahan perekonomian Orde Baru.

Sebelum terlanjur bicara terlalu jauh tentang hal ini, sebaiknya dijernihkan apa yang dimaksud dengan fundamental ekonomi di dalam uraian ini. Terminologi ini sering dianggap kabur (*vague*) dan tidak begitu umum digunakan di dalam analisis ekonomi yang ketat. Demi menghindari kesalah fahaman kita perlu memberi batasan terhadap istilah ini. Secara operasional pengertian fundamental ekonomi yang digunakan dalam uraian ini adalah keseluruhan kinerja dan kualitas ekonomi (makro) yang meliputi: pertumbuhan, inflasi, kesempatan kerja (dan pengangguran), tingkat kemiskinan, distribusi pendapatan, nilai tukar, transaksi berjalan (neraca pembayaran), cadangan devisa, beserta tingkat keyakinan konsumen, tingkat keyakinan bisnis, dan tingkat keyakinan terhadap sektor perbankan (dan keuangan lainnya).

Paling tidak ada tiga sumber utama dari permasalahan NP yang kita hadapi. *Pertama*, kelemahan struktural dimana sektor industri manufaktur sangat minim menghasilkan barang setengah jadi dan barang modal. Sebagai akibatnya rangkaian pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi membutuhkan pertumbuhan impor yang lebih cepat. *Kedua*, pertumbuhan pendapatan yang berlangsung selama beberapa tahun terakhir di satu pihak tidak mampu diimbangi oleh produksi barang konsumsi seperti sejumlah bahan pangan termasuk hasil peternakan. Dalam hal kebutuhan BBM persoalan kenaikan harga yang sangat politis menjadi penyebab tambahan. *Ketiga*, situasi ekonomi dan perdagangan dunia mengakibatkan merosotnya nilai ekspor Indonesia beberapa tahun terakhir. Jadi sumber masalah ketidakseimbangan eksternal yang kita hadapi pun sungguh sudah kompleks. Didalamnya ada persoalan struktural, kebijakan yang tidak memadai, kurang antisipatif, dan situasi ekonomi dan perdagangan dunia yang tidak menguntungkan.

Dalam masa pemulihan setelah krisis besar Asia, defisit transaksi berjalan (TB) pada mulainya lebih bersifat sementara, namun cenderung dalam kurun waktu yang semakin panjang, misalnya pada kw-1 thn 2004, kw-3 thn 2005 dan kw-2 sampai kw-4 thn 2008. Respons Pemerintah yang cukup cepat terutama dengan menaikkan harga BBM menjadi salah satu alasan pemulihan yang juga cepat.

Sejak September 2011, diawali gejolak yang berasal dari krisis Yunani, transaksi berjalan (TB) di dalam NPI mulai dan selanjutnya terus menerus mengalami defisit sampai hari ini. Gejala tersebut terus menekan kurs rupiah, dibarengi berkurangnya *capital inflow*, serta cadangan devisa pun mulai terpengaruh. Tekanan bertambah besar dengan penundaan-penundaan kenaikan harga BBM yang berfungsi mengurangi subsidi di dalam APBN maupun impor BBM.

Defisit TB ini sendiri menjadi faktor yang berperan memberi tekanan kepada keseimbangan makro, khususnya terhadap nilai tukar. Tentu saja manakala terjadi bentuk *shock* yang lain, seperti tekanan aliran keluar modal dan/atau inflasi, maka defisit TB ini akan memperbesar tekanan, karena berisiko memperbesar ketidakseimbangan. Ada analisis yang mengatakan bahwa defisit TB tidak perlu dikhawatirkan, karena akan ada penyeimbang dari bagian NP yang lain. Pandangan demikian hanya berarti secara *ex-post*, dan mengabaikan dinamika yang terjadi secara *ex-ante*. Artinya penyeimbang dimaksud akan terjadi dalam bentuk surplus neraca Modal dan Finansial atau pengurangan jumlah Cadangan Devisa. Jika neraca Modal dan Finansial juga menghadapi masalah, maka seluruh beban akan jatuh kepada Cadangan Devisa.

### **Kelembagaan Ekonomi Kurang Diperhatikan**

Saya menyebutkan di atas, bahwa defisit TB ini sebagai salah satu faktor kelemahan fundamental ekonomi Indonesia, karena masih terdapat sejumlah kelemahan lain. Hanya saja kelemahan lain dimaksud jarang ditonjolkan atau pengaruhnya tidak terlihat langsung kepada fundamental ekonomi. Berikut ini mari kita tinjau secara ringkas saja faktor-faktor dimaksud serta sumber utama yang menyebabkannya sebagai kelemahan.

Apakah kita bertujuan meningkatkan daya saing-daya tahan ekonomi, atau pertumbuhan ekonomi- yang sifatnya berkelanjutan pertama-tama pasti dilandasi oleh sejumlah faktor yang membentuk fundamental ekonomi itu sendiri. Daftar dari pilar yang membentuk fundamental ekonomi tersebut bisa disusun lebih panjang atau lebih pendek, tetapi untuk Indonesia sekurang-kurangnya adalah keenam faktor di bawah ini. Tinjauan ringkas lebih ditekankan kepada unsur utama yang menjadi kendala pencapaian kinerja yang optimal.

*Pertama*, pembangunan infrastruktur fisik yang sudah banyak diwacanakan, merupakan kelemahan yang selama ini belum teratasi. Selain melalui anggaran, atau mengundang investor, kebanyakan negara membentuk lembaga keuangan-bank atau non-bank-sebagai lembaga penting pengembangan infrastruktur. Untuk menjaga integritas dan kapasitasnya perlu disusun dasar hukum dalam bentuk Undang-undang. Sumber modal dan pendanaannya berasal dari masyarakat serta negara. Selanjutnya penting aturan-aturan dan mekanisme penetapan konsesi, pembebanan tariff/harga, hak dan kewajiban pemegang konsesi. Masalah pembebasan tanah perlu dilandasi dengan peraturan yang adil dan pelaksanaan yang konsisten.

Selain infrastruktur, masih ada faktor lain yang tidak kalah penting, yaitu sumberdaya manusia termasuk perangkat peraturan dan kebijakan tenaga kerja. Dewasa ini dengan anggaran pendidikan yang cukup besar dan terjamin, kebijakan dan langkah bidang pendidikan terlalu fokus dan terbatas pada pendidikan umum, dan sangat kurang dalam pelatihan kompetensi dan ketrampilan. Tidak terlihat mekanisme insentif dan biaya, organisasi/lembaga penyusun standar kompetensi di berbagai kegiatan, sertifikasi dan akreditasi lembaga pelatihan, serta perangkat aturannya. Bahkan ada kesan tidak jelas arah dan strategi pengembangan pendidikan jenis ini. Padahal Indonesia tertinggal jauh dari negara-negara tetangga dalam bidang ini, yang merupakan faktor kunci dalam membentuk daya saing yang sesungguhnya.

Lembaga keuangan untuk pembiayaan berbagai kegiatan termasuk untuk pengembangan dan peningkatan produktifitas (modernisasi). Tidak ada bangsa yang bisa maju tanpa dukungan jaringan lembaga keuangan yang terjangkau masyarakat umum baik dari segi harga maupun layanannya. Perbankan sebagai lembaga keuangan paling dominan di Indonesia telah berbenah sejak krisis besar Asia tahun 1997-98. Namun penyehatan yang terjadi cenderung bersifat nominal saja, dimana CAR maupun NPL menjadi lebih baik. Gambarnya akan berbeda jauh bila diukur dari keterjangkauan masyarakat, baik diukur dari akses maupun harganya. Lagipula konsolidasi sektor perbankan itu sendiri sangat minim sehingga struktur sektor ini tetap lemah. Sejumlah perbaikan yang ditempuh beberapa tahun terakhir, dalam bentuk



pengaturan dan pengawasan, baru merupakan tahap awal kearah konsolidasi perbankan yang lebih efisien dan sehat untuk mendukung perekonomian nasional.

Jika ditinjau lebih jauh ke tatanan sektor perbankan akan segera tampak heterogenitas dan segmentasi di dalamnya. Artinya dalam hal terjadi tekanan maka akan mencuat hubungan dan mekanisme antar-bank sangat lemah dalam meredam gejala. Segelintir bank besar yang relatif kuat dan sehat sejauh ini sangat sedikit membuka *window* pinjaman antar bank. Jika satu atau beberapa bank kecil dan menengah mengalami kesulitan likuiditas maka *window* yang tersedia sangat terbatas, yaitu bank yang bersangkutan menjual asset-yang kemungkinan besar tidak memadai- atau meminta bantuan likuiditas ke bank sentral. Upaya yang disebut terakhir ini umumnya dihindari bank karena pertama akan mengundang stigma. Untuk permasalahan yang berat malah bukan tidak mungkin berisiko secara politik. Jadi walaupun tingkat kesehatan perbankan secara rata-rata baik, namun cukup rawan tergelincir ke dalam instabilitas.

Selanjutnya kebijakan industrial, yang dewasa ini melahirkan struktur industri yang lemah dalam menghasilkan barang modal dan bahan baku. Pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dalam beberapa tahun terakhir membutuhkan investasi dan kemudian impor barang modal, bahan baku maupun alat transportasi dalam jumlah besar. Secara parsial dan sporadis bukan tidak ada kebijakan dirumuskan, seperti insentif fiskal misalnya, untuk mendorong perkembangan sektor industri. Bahkan sejumlah koridor pembangunan industri seperti MP3EI dan terakhir upaya hilirisasi produk primer, telah diluncurkan. Akan tetapi Pemerintah, pusat maupun daerah, lemah dalam pemenuhan prasarana dasar yang merupakan pekerjaan rumahnya, seperti menyusun rancangan detail tata-ruang, akses keluar-masuk utama, dan penyaringan air bersih. Investor membutuhkan iklim kepastian berusaha dan leadership. Mereka menunggu tersedia barang publik atau semi-publik yang kental dengan unsur eksternalitas. Selanjutnya dalam suatu kebijakan industri perlu disusun prioritas jenis kegiatan –terutama barang setengah-jadi dan barang modal– sekaligus dilengkapi dengan paket insentif.

Bahkan kebijakan pemenuhan hasil-hasil pangan dari sektor pertanian, termasuk peternakan, semakin ketinggalan dari perkembangan kebutuhan. Jaringan distribusi dan pemasaran tetap kental dengan praktek eksploitasi terhadap petani dan atau konsumen. Situasi yang demikian tentu menghambat produsen (petani) memperoleh porsi harga yang wajar dari harga eceran. Terlebih lagi bila dikaitkan dengan mayoritas penguasaan lahan yang sangat didominasi skala kecil/mikro, sehingga tidak memungkinkan petani menggantungkan hidup secara penuh waktu dalam bidang ini. Dengan kondisi demikian sulit bagi petani untuk merespons atau bahkan untuk memanfaatkan kebijakan atau stimulus apalagi memanfaatkan sinyal pasar. Tiga empat tahun lalu Pemerintah melansir wacana dan persiapan kebijakan mendorong pengolahan tanah terlantar atau menganggur untuk mengembangkan berbagai kegiatan produktif di bidang pertanian. Dengan demikian akan terjadi proses lahirnya berbagai kegiatan pertanian, peternakan dan perikanan dengan skala yang lebih rasional. Artinya disatu pihak kegiatan tersebut mampu mendukung pekerjaan penuh kepada petaninya. Dipihak lain para petani atau pengolah lebih mampu merespons sinyal pasar dan stimulus, seperti memperbaiki cara bercocok tanam untuk meningkat produktifitas lahan. Kelihatannya kelembagaan ekonomi di bidang ini justru paling lemah untuk menjawab persoalan pangan nasional maupun kesejahteraan petani, terlebih-lebih di Jawa.

Bidang energi berkaitan sangat erat dengan kebijakan harga dan dengan demikian kebijakan subsidi. Sesungguhnya dibelakang kedua faktor ini terentang persoalan lain yang lebih pelik, yaitu alokasi penggunaan sumberdaya bukan hanya dalam bentuk penggunaan energinya sendiri tetapi yang lebih penting lagi dalam bentuk dorongan atau hambatan perkembangan berbagai kegiatan menurut tingkat pemakaian energi. Artinya kegiatan yang menggunakan energi yang menikmati subsidi memperoleh insentif dibandingkan kegiatan yang bukan. Dewasa ini Indonesia sedang bersiap-siap pula menghadapi subsidi bentuk lain, yaitu subsidi kepada orang dalam rangka SJSN, yang akan dimulai tahun 2014 dengan Jamkesmas. Pada gilirannya nanti, akan berakumulasi jenis subsidi komoditi dengan subsidi orang. Berarti beban anggaran negara semakin berat.

Jalan keluar yang paling terjangkau mengenai subsidi ini adalah merancang skenario penghapusan subsidi komoditi kearah subsidi orang dan alokasi anggaran untuk infrastruktur. Misalnya saja, dengan total subsidi komoditi sebesar Rp 350 T pertahun dirancang skenario penghapusannya dalam waktu 10 tahun. Untuk

penyederhanaan, anggaplah persoalannya diwakili BBM dan harga minyak mentah tidak berubah. Misalnya, dengan kenaikan harga BBM ditetapkan pengurangan subsidi Rp35T setahun. Pengurangan subsidi tersebut dialokasikan masing-masing sepertiga untuk subsidi orang, infrastruktur pedesaan dan infrastruktur ekonomi lainnya. Pada tahun ke sebelas Indonesia tidak perlu membiayai subsidi komoditi lagi. Yang perlu dilanjutkan adalah subsidi orang yang tepat sasaran, serta pembiayaan infrastruktur pedesaan dan infrastruktur ekonomi yang lain. Dengan sosialisasi yang baik saya percaya solusi ini bisa diterima mayoritas masyarakat.

Dari tinjauan ringkas di atas jelas menunjukkan bahwa semua pihak, termasuk Pemerintah, bukan tidak menyadari faktor-faktor tersebut. Namun keberhasilannya hanya sampai tingkat cita-cita saja, dan sangat minim dalam implementasi dan *delivery*. Mari kita ambil satu contoh wacana yang dilansir belum lama ini, yaitu keinginan merubah pencatatan ekspor dari FOB menjadi CIF. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut dibutuhkan perangkat peraturan termasuk insentif dan disinsentif, kesiapan lembaga pendukung, memperbaiki praktek umum, serta membentuk institusi pemberi informasi dan konsultasi. Sudah menjadi praktek umum bahwa eksportir kita sekedar mencari pembeli diluar, tidak mau repot mengurus sejumlah jasa seperti asuransi, jasa pengiriman dan *freight*. Lagipula di Indonesia belum berkembang kelembagaan yang terpercaya tentang standar berbagai produk ekspor. Hasil jasa pekerjaan ini menjadi input berharga bagi perusahaan asuransi, *handling* dan *freight*. Pendeknya perlu dukungan seperangkat peraturan dan kegiatan jasa modern untuk mendukung keinginan tersebut. Bahkan untuk merubah praktek umum yang sudah berlangsung puluhan tahun, dibutuhkan aturan mengenai insentif bagi yang melaksanakannya dan atau penalti bagi yang masih mengabaikannya.

Tentu praktek dan pelaksanaannya masih lebih sulit dan rumit dari gambaran ringkas di atas. Namun untuk kepentingan kita dalam kesempatan ini uraian ringkas tersebut cukuplah sebagai ilustrasi terhadap pentingnya peran pembangunan kelembagaan ekonomi. Dengan demikian berbagai cita-cita yang telah digariskan tidak terus menerus menjadi wacana saja.

Secara umum rendahnya *delivery* dan kinerja berbagai faktor yang telah dikemukakan di bagian sebelumnya, bisa ditarik benang merah kepada kekurangan dukungan kelembagaan ekonomi yang *appropriate*. Penting digaris bawahi bahwa yang dimaksud dengan kelembagaan ekonomi adalah keseluruhan peraturan perundangan, perilaku umum, dan organisasi di masyarakat yang mempengaruhi dan menggiatkan ekonomi. Pada kenyataannya kita sering tidak mendorong lahirnya kelembagaan termasuk peraturan perundangan yang dibutuhkan agar masyarakat bekerja baik dan efisien memperbaiki kinerja ekonomi. Kelembagaan ekonomi atau unsurnya tidak dibentuk bisa jadi karena tidak faham, tetapi bisa juga karena lembaga pemerintahan terkait tidak ingin. Di pihak lain, kendala ekonomi serta kelemahan tatanan sosial masyarakat itu sendiri menjadi kendala.

### **Saatnya Membenahi dari Dasar**

Menyimak pengalaman ekonomi bangsa kita paling tidak pada tahun 2005, 2008, dan 2013 ini, sepatutnya memberikan alarm bagi kita semua, otoritas maupun masyarakat. Pada ketiga tahun tersebut Indonesia menaikkan harga BBM, dalam situasi iklim ekonomi regional dan atau global mengalami gangguan. Pada tahun 2005 terjadi mini-krisis di Indonesia dan kawasan, pada tahun 2008 mulai merambat krisis ekonomi global, sedangkan pada tahun 2013 ekonomi global masih belum keluar dari krisis. Kenaikan harga BBM pada ketiga peristiwa tersebut selalu disertai oleh kenaikan inflasi dan kurs terhadap US\$ serta penurunan pertumbuhan ekonomi di atas ekspektasi (dengan catatan pada tahun 2008 kurs memburuk setelah harga BBM diturunkan kembali karena dipicu oleh *shock* Lehman Brother). Sudah saatnya penetapan kebijakan yang penting tidak menunggu keadaan terpaksa dan pada saat tidak ada jalan lain yang bisa dilakukan lagi.

Tentu kurang beralasan untuk menyimpulkan bahwa hal ini terjadi karena kita tidak belajar dengan baik dari peristiwa sebelumnya. Lebih masuk akal untuk menerima bahwa sekalipun telah dicapai sejumlah perbaikan, mekanisme dan kelembagaan untuk melakukan kajian dasar dan usulan kebijakan belum dibentuk. Di dalam negara seperti Indonesia, dimana siklus pemerintahan semakin teratur, merupakan hal yang niscaya bagi negara memiliki institusi kajian strategis dalam berbagai bidang dan kebutuhan pembangunan. Institusi yang dimiliki negara dalam hal ini tidak berarti berstatus Lembaga Negara. Tetapi

institusi dimaksud tidak langsung di bawah pemerintah, sehingga kesinambungan pemikiran dan pekerjaannya terjaga. Tentu status dan “reward”-nya perlu diperhatikan untuk membangun martabat dan kredibilitas institusi serta profesionalitas para ahli dan SDM-nya.

Sudah waktunya pula setiap lembaga publik mengkaji secara sistematik kondisi kelembagaan ekonomi di bidang masing-masing. Keperluan tersebut bukan hanya agar jangan terlambat, tetapi lebih dari itu agar ekonomi dan bangsa kita tidak terus tertatih dan terombang-ambing di dalam gejolak dan dinamika global. Bahkan untuk hal penting yang langsung membentuk fundamental ekonomi perlu dilakukan “audit” kinerja untuk mengetahui efektifitas dan efisiensinya. “Audit” dimaksud bias dilakukan oleh konsultan profesional, memiliki pengalaman dan *database* agar mampu mem”benchmark” dengan praktek terbaik misalnya dengan negara-negara di kawasan. Berdasarkan itu bisa diidentifikasi berbagai kelemahan beserta rekomendasi perbaikannya.

Tanpa bermaksud membuka polemik diantara penganut mazhab ekonomi yang berbeda, tidak bisa dipungkiri bahwa sangat minim perhatian ekonom pada umumnya terhadap peranan kelembagaan dalam pencapaian kinerja ekonomi. Banyak diantara kita yang merasa nyaman dengan analisis disertai rekomendasi yang bersifat *marginal* untuk perbaikan. Kita jarang menekuni struktur, perilaku (*conduct*), efektifitas, efesiensi dari bidang atau kegiatan yang dialami, disertai analisis berkenaan dengan peraturan perundangan, organisasi/lembaga, serta praktek yang berlaku umum.

Dengan membangun dan mengembangkan kelembagaan ekonomi yang diperlukan di berbagai bidang tentu tidak berarti segalanya akan terjawab dan terselesaikan. Tetapi kita berarti telah membangun landasan dan mekanisme yang sehat dan kuat untuk menilai dan menyempurnakan efektifitas dan efisiensi pencapaian berbagai bidang di masyarakat. Sebagaimana kata orang bijak, dengan metode yang benar pun belum tentu kita mencapai hasil yang optimum, tetapi sebaliknya dengan metode yang salah siap-siaplah menuai hasil yang mengecewakan.

\*\*\*